

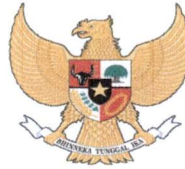


**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 24 TAHUN 2024**



TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nommor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah kabupaten.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.030.307.107.411,00 (satu triliun tiga puluh miliar tiga ratus tujuh juta seratus tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp144.208.308.025,00 (seratus empat puluh empat miliar dua ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.694.984.539,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - (2) Retribusi daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.322.394.480,00 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.347.929.006,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam rupiah);

- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.843,000,000,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.694.984.539,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah;
 - c. Pajak sarang burung walet;
 - d. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- (3) Pajak Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp 4.557.781.411,00 (empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah);

- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.142.000.000,00 (enam belas miliar seratus empat puluh dua juta rupiah);
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 14.295.799.874,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.844.403.254,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.322.394.480,00 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Retribusi retribusi pelayanan pasar;
 - e. Retribusi pelayanan kebersihan;
 - f. Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/vila;
 - g. Retribusi rumah potong hewan;
 - h. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - i. Retribusi penjualan produksi usaha daerah;
 - j. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - k. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - l. Retribusi pemanfaatan aset daerah;
 - m. Retribusi persetujuan bangunan gedung.

- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.674.294.480,00 (delapan puluh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (7) Retribusi Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (8) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (9) Retribusi Tempat rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (11) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- (13) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 1.175.100.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- (14) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.347.929.006,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu enam rupiah) yang terdiri atas:
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.843.000.000,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan aset lain-lain;
 - b. Jasa giro pada kas daerah;
 - c. Jasa giro di kas bendahara;
 - d. Tuntutkan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya;
 - e. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lainnya;
 - f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pendapatan denda pajak reklame;
 - h. Pendapatan denda pajak air tanah;
 - i. Pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - k. Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - l. Pendapatan denda retribusi jasa umum;
 - m. Pendapatan denda retribusi jasa usaha;
 - n. Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu;

- o. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
 - p. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN.
- (2) Hasil Penjualan Aset Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Jasa Giro Pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
 - (4) Jasa Giro di Kas Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (5) Penerimaan Tuntutan Ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - (6) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.503.500.000,00 (satu miliar lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (8) Pendapatan denda Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (9) Pendapatan denda Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (10) Pendapatan denda Pajak Mineral bukan Logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (11) Pendapatan Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (12) Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (13) Pendapatan denda Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (14) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (15) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (16) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (17) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp874.234.646.171,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp827.538.489.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.696.157.171,00 (empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp11.864.153.215,00 (Sebelas miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.764.153.215,00 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan Rp1.101.791.542.379,00 (satu triliun seratus satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp877.710.454.245,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus sepuluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 529.661.206.377,35 (lima ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh lima rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp334.129.817.582,65 (tiga ratus tiga puluh empat miliar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh dua koma enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar (nol rupiah)
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar (nol rupiah)
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.919.430.285,00 (Tiga belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar (nol rupiah)

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp93.123.528.434,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.122.654.670,00 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.685.519.764,00 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.054.212.700,00 (empat puluh enam miliar lima puluh empat juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.799.955.300,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp461.186.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp9.775.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp121.182.559.700,00 (Seratus dua puluh satu miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.134.311.500,00 (lima miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.048.248.200,00 (seratus enam belas miliar empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp72.984.434.968,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp Rp72.984.434.968,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas;
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.984.434.968,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Penyertaan Modal daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dan belanja (defisit) sebesar Rp71.484.434.968,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp71.484.434.968,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran II Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran IIIa Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- Lampiran IIIb Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- Lampiran IVa Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- Lampiran IVb Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- Lampiran Va Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- Lampiran Vb Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- Lampiran VIa Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Desa.

Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 30 Desember 2024

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKa

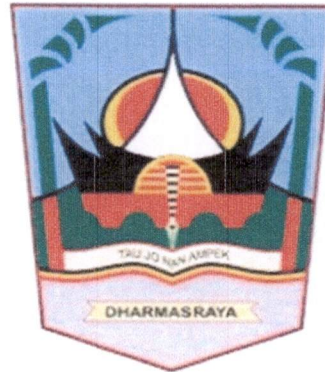
Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH,


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 NOMOR : 24

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NO 14 TAHUN 2024

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 24 Tahun 2024
Tanggal : 30 Desember 2024

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	144.208.308.025,00
4.1.01	Pajak Daerah	48.694.984.539,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	280.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	280.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	280.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	65.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	65.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	65.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.557.781.411,00
4.1.01.15.01	PBBP2	4.557.781.411,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.557.781.411,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	16.142.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.350.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	1.350.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	14.500.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	14.000.000.000,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	500.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	270.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	270.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	12.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	12.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	10.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	10.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14.295.799.874,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	14.295.799.874,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	14.295.799.874,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.844.403.254,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	7.844.403.254,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	7.844.403.254,00
4.1.02	Retribusi Daerah	83.322.394.480,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	80.981.294.480,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	80.674.294.480,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.274.294.480,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	77.200.000.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	200.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	72.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	72.000.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	30.000.000,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.041.100.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	5.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	800.000.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	20.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	75.000.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	705.000.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	12.500.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	12.500.000,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	40.500.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	40.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.175.100.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.175.100.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	300.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	300.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.347.929.006,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.347.929.006,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.347.929.006,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.347.929.006,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.843.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	500.000.000,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	500.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.200.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.200.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.200.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.000.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.000.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.000.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.503.500.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.503.500.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.503.500.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	250.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	250.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	250.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	135.000.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.000.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	5.000.000,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	100.000.000,00
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	20.000.000,00
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	5.000.000,00
4.1.04.12.19.0004	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	5.000.000,00
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	5.000.000,00
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	5.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.500.000,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	500.000,00
4.1.04.13.01.0046	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan	500.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	3.500.000,00
4.1.04.13.02.0046	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah	3.500.000,00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	500.000,00
4.1.04.13.03.0016	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	500.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	250.000.000,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	50.000.000,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	50.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	200.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	100.000.000,00
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	100.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	874.234.646.171,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	827.538.489.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	56.185.785.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	56.185.785.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	56.185.785.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.204.202.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.204.202.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.204.202.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	50.144.287.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	19.334.090.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	13.680.343.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.602.855.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.213.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	46.679.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	26.729.790.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	3.280.635.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	914.039.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	21.373.906.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	327.405.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	4.080.407.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	4.080.407.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	533.940.082.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	426.787.552.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	426.787.552.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	107.152.530.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	11.476.300.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	34.559.893.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	26.554.670.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	34.561.667.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	180.064.133.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	30.878.600.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.612.280.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	214.449.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.231.320.000,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	22.820.551.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	149.185.533.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	79.293.484.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	902.500.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.373.903.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.917.298.000,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	287.749.000,00
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	10.954.587.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.076.212.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	2.505.647.000,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	33.579.178.000,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.253.250.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.023.125.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	868.600.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.696.157.171,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	46.696.157.171,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.696.157.171,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.194.862.312,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	263.778.234,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.237.516.625,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.864.153.215,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	100.000.000,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	100.000.000,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	100.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.764.153.215,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.764.153.215,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.764.153.215,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.764.153.215,00
	Jumlah Pendapatan	1.030.307.107.411,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	877.710.454.245,00
5.1.01	Belanja Pegawai	529.661.206.377,35
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	348.921.368.119,35
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	242.466.058.972,35
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	166.862.787.534,35
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	75.603.271.438,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26.478.310.990,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.360.445.000,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.117.865.990,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.836.559.994,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3.833.792.994,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	2.767.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.821.683.988,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.195.565.998,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8.626.117.990,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.464.848.992,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.357.372.992,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	107.476.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.594.076.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.104.153.000,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.489.923.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	353.999.996,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	353.999.996,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	109.558.190,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	39.499.992,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	70.058.198,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.488.685.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.622.829.000,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.865.856.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	621.493.520,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	429.360.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	192.133.520,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.923.906.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.349.036.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	574.870.000,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.762.186.477,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.783.066.927,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	3.979.119.550,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	154.627.664.553,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	69.358.843.106,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	69.358.843.106,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	85.268.821.447,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	8.960.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	2.080.000,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	320.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.000.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	172.727.979,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	160.000.000,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	464.000.000,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsean Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	500.352.995,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsean Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	274.554.113,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	160.000,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	2.304.000,00
5.1.01.02.06.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	960.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	160.000,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	9.600.000,00
5.1.01.02.06.0053	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	6.400.000,00
5.1.01.02.06.0055	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	400.000,00
5.1.01.02.06.0057	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.296.000,00
5.1.01.02.06.0058	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	160.000,00
5.1.01.02.06.0060	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	96.000,00
5.1.01.02.06.0062	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	25.600.000,00
5.1.01.02.06.0063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	37.303.360,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	79.293.484.000,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.373.903.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	902.500.000,00
5.1.01.02.06.0068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	7.800.000,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.700.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.339.194.970,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	688.583.994,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	688.583.994,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	69.701.996,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	69.701.996,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	92.491.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	92.491.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	68.858.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	68.858.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	998.446.988,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	998.446.988,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	115.138.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	115.138.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	43.914.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	43.914.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.000.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.000.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	999.992,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	999.992,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.250.601.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	65.731.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.000.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.175.870.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.184.460.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.184.460.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	971.276.778,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.270.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.270.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.437.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.437.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	108.486.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	108.486.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.000.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.000.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.000.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.000.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.431.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.431.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.000.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.000.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.000.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.000.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	726.842.638,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	5.040.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.170.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	180.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.000.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	28.349.592,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	90.000.000,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	261.000.000,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	214.436.998,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	117.666.048,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	47.497.140,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.600.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	90.000,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.296.000,00
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	540.000,00
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	90.000,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	54.000,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	5.400.000,00
5.1.01.05.11.0036	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	225.000,00
5.1.01.05.11.0038	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	729.000,00
5.1.01.05.11.0039	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	90.000,00
5.1.01.05.11.0043	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	14.400.000,00
5.1.01.05.11.0044	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	20.983.140,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	11.200.101.957,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	11.200.101.957,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	11.200.101.957,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.129.817.582,65

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01	Belanja Barang	57.411.621.888,65
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	56.903.534.888,65
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.850.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	91.360.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.507.217.350,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.161.078.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	6.959.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.023.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.985.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.426.388.200,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	44.900.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	128.133.500,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.740.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	100.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	412.041.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	934.506.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.121.458.924,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	219.180.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	800.639.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.600.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	334.704.750,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	15.420.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	94.890.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	85.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	693.075.500,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.140.153.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	79.267.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.427.546.872,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16.718.651.292,65
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.469.693.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	103.740.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.857.278.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	928.420.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.375.049.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	284.500.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	400.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	313.880.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	450.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	155.950.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	279.750.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	235.980.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	508.087.000,00
5.1.02.01.04.0023	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.700.000,00
5.1.02.01.04.0044	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.800.000,00
5.1.02.01.04.0104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.950.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	750.000,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	410.340.000,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.440.000,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	2.695.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.915.000,00
5.1.02.01.04.0124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.750.000,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5.300.000,00
5.1.02.01.04.0204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	642.000,00
5.1.02.01.04.0221	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	400.000,00
5.1.02.01.04.0317	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.900.000,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	11.270.000,00
5.1.02.01.04.0448	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	5.610.000,00
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	1.625.000,00
5.1.02.01.04.0523	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	16.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	106.167.335.593,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	61.026.811.593,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	621.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.709.100.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	714.700.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	73.600.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	5.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	28.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	667.200.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	462.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.893.325.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	177.553.500,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.166.760.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	872.990.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	492.895.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	88.370.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.230.800.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	227.790.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	200.640.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	689.864.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.476.890.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	58.080.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	955.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.009.760.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.216.480.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.495.520.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	621.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	28.710.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	166.900.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	128.250.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	120.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	139.400.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	724.855.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.613.900.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	194.043.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	10.200.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	60.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.644.880.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	631.046.800,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	48.975.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.219.243.895,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.827.228.128,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	75.700.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	22.629.400,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	554.350.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	5.000.007.870,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	8.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	749.215.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	190.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.219.850.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	340.710.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	50.400.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.468.424.800,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.300.320.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	13.319.336.800,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	470.400.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	587.636.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	297.532.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	490.000.000,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	3.200.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.313.336.100,00
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	7.200.000,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	9.000.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	87.205.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	897.200.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	35.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	533.150.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	206.944.100,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	350.742.500,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	186.894.500,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.486.209.200,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.400.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	1.331.430.200,00
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	60.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	42.379.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	3.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.775.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	500.000.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	150.000.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.125.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.010.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	950.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	60.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	9.300.000.000,00
5.1.02.02.10.0009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	9.300.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.784.553.900,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.512.247.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	7.209.407.900,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.949.009.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	113.890.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.143.064.500,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	39.999.180,00
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	39.999.180,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.333.570.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	225.000.000,00
5.1.02.03.02.0015	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	14.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	42.000.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	60.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	500.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.790.940.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	145.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	578.750.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	21.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	180.000.000,00
5.1.02.03.02.0059	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0085	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	40.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	9.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	28.500.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	223.000.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	87.500.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	205.500.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	66.380.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	15.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.086.895.320,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.086.895.320,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.682.600.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	2.500.000.000,00
5.1.02.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	70.000.000,00
5.1.02.03.04.0119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	62.500.000,00
5.1.02.03.04.0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	50.100.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	51.627.053.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.627.053.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.978.604.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.644.879.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.570.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	405.280.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	405.280.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	405.280.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	23.901.204.036,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	23.012.444.036,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	22.201.428.536,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	811.015.500,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	683.060.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	653.060.000,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	205.700.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	160.700.000,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.932.333.855,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.932.333.855,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.932.333.855,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.541.924.710,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.541.924.710,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.541.924.710,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.919.430.285,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	181.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	181.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	181.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.405.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.250.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.250.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.155.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.155.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	935.965.285,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	935.965.285,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	935.965.285,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	8.397.465.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.244.500.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.244.500.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.400.065.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.400.065.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	752.900.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	752.900.000,00
5.2	BELANJA MODAL	93.123.528.434,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.122.654.670,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	217.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	217.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	217.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.672.520.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.672.520.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.696.020.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	176.500.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.800.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.200.925.550,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	13.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	13.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.164.425.550,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	889.730.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	41.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	211.700.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	66.600.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	953.145.550,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.750.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	23.500.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	3.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	20.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	252.238.600,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	252.238.600,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	194.213.600,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	58.025.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	597.215.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	307.600.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	8.000.000,00
5.2.02.07.01.0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	299.600.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	289.615.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	289.615.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.647.609.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.188.634.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.188.634.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	458.975.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	46.500.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	412.475.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	50.000.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	50.000.000,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	50.000.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	59.549.328,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	59.549.328,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	59.549.328,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.969.676.164,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	3.969.676.164,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	3.746.005.164,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	223.671.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.455.921.028,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.455.921.028,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.455.921.028,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.685.519.764,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	20.544.029.764,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.393.426.788,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.165.163.459,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.568.539.671,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	977.774.085,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.432.151.573,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	249.798.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	150.602.976,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	150.602.976,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	225.990.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	225.990.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	225.990.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	915.500.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	915.500.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	915.500.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.054.212.700,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	40.044.762.700,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	36.480.512.700,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	36.348.592.700,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	131.920.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.564.250.000,00
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	3.564.250.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.682.700.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.586.480.000,00
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	337.450.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.249.030.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	597.000.000,00
5.2.04.02.06.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	597.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.499.220.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.499.220.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	814.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	814.000.000,00
5.2.04.03.03.0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	814.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	212.750.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	212.750.000,00
5.2.04.04.01.0001	Belanja Modal Jaringan Pembawa	212.750.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	300.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	300.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	300.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.799.955.300,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	70.147.500,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	70.147.500,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	9.107.500,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	61.040.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	82.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	82.000.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	50.000.000,00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	32.000.000,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	42.000.000,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	42.000.000,00
5.2.05.03.02.0001	Belanja Modal Ternak Potong	42.000.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	3.605.807.800,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	3.605.807.800,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	3.387.244.300,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	218.563.500,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	461.186.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	461.186.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	461.186.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	461.186.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.775.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.775.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	9.775.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	9.775.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	9.775.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	121.182.559.700,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.134.311.500,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.870.101.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.870.101.500,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.870.101.500,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	264.210.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	264.210.000,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	264.210.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.048.248.200,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	116.048.248.200,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	116.048.248.200,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	116.048.248.200,00
	Jumlah Belanja	1.101.791.542.379,00
	Total Surplus/(Defisit)	-71.484.434.968,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.984.434.968,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	72.984.434.968,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	72.984.434.968,00
6.1.01.07.02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	72.984.434.968,00
6.1.01.07.02.0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	72.984.434.968,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	71.484.434.968,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Dharmasraya, 30 Desember 2024

Bupati



SUTAN RISKA